

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang

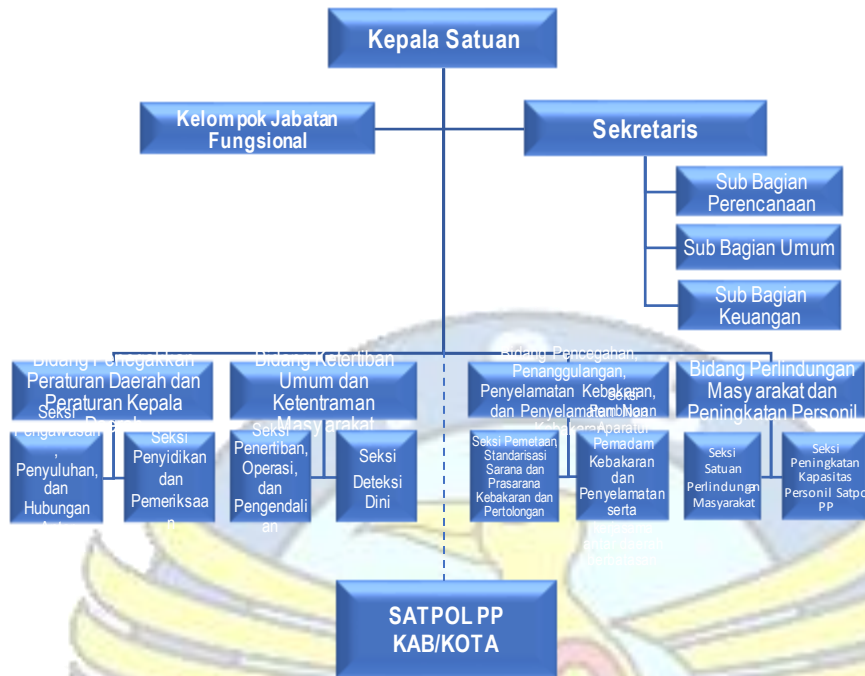
Tahun 2000 ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lahir, Satuan Polisi Pamong Praja masih berada dalam Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satpol PP bernaung di bidang Trantibum, berkantor di Ex. Kantor Pembantu Gubernur dan wisma 4 jl. Sudirman.

Pada tahun 2007 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri sendiri dengan status kantor eselon IIB dan berkantor di Rumah Dinas Pemprov. Kep. Babel. Kepala Satpol PP prov. Babel yang menjabat saat itu adalah Doniawan Gultom, SH. Kemudian digantikan oleh Najamuddin, SH. Hingga menjelang akhir tahun 2011. Pada September 2011 dilantik Syahrizal T. sebagai Kepala Satpol PP Prov. Babel.

Tahun 2012 Kantor Satpol PP Prov. Kep. Babel pindah ke gedung Serba Guna Prov. Kep. Babel. Lantai 1. Kemudian pada tahun 2013 Satpol PP berubah eselonering dari IIB ke IIA. Pejabat Kepala Satpol PP mulai 28 Januari 2013 berturut-turut adalah Sevrino Wedyawan (28 Januari 2013 - 30 September 2013), Drs. Marwan Muchtar, MM (1 Oktober 2013 – 7 Agustus 2014), Miwartono S. (8 Agustus 2014 – 27 Desember 2015), Drs. Harrie Patriadie (28 Desember 2015 -2017), Yamowa'a L.S.H. Harefa, AP (2017-Sekarang).

3.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

3.4 Visi dan Misi Organisasi(Dinas)

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, visi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi

Gambar 1.2. Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Dari visi tersebut, terdapat 5 (lima) makna pernyataan yang terkandung, yakni:

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. Sejahtera menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antara masyarakat mengecil.
3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketata pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. Teknologi dimaknai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk pencapaian visi dan misi yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Sedangkan misi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- 1. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.**
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia unggul dan handal dan bertalenta digital.**
- 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat.**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.**
- 5. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.**
- 6. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.**

Gambar 1.3. Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Berdasarkan arah kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 di atas, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, maka misi yang lebih diarahkan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah misi ke 4 (empat), yakni “*mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi*”. Namun bukan berarti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengabaikan dukungan terhadap misi lainnya, dukungan senantiasa akan tetap diwujudkan dalam bentuk integrasi pada level kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

